



BUPATI KEDIRI  
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 13 TAHUN 2018  
TENTANG  
ALOKASI DANA DESA (ADD)  
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 12 Januari 2018, Nomor 412.6 / 81 / 418.24 / 2018, perihal Rencana Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 dan Berita Acara Nomor 412.6 / 492 / 418.24 / 2018 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 tanggal 22 Pebruari 2018, perlu mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD) PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2018

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kediri.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.



11. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
14. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
17. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
24. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan diberikannya ADD adalah :
  - a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
  - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
  - c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
  - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
  - e. meningkatkan kemandirian desa.
- (3) Prinsip pengelolaan ADD meliputi:
  - a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
  - b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

## BAB III PENGALOKASIAN

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk ADD setiap Tahun Anggaran ;
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) ;
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

- (1) Besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa dibagi dengan ketentuan :
  - a. 60 % (enam puluh persen) dibagi rata seluruh Desa ;
  - b. 40 % (empat puluh persen) dibagi secara Proporsional.
- (2) Pembagian secara Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada variabel yang terdiri dari :
  - a. Jumlah penduduk Desa ;
  - b. Angka kemiskinan Desa ;
  - c. Luas wilayah Desa ;
  - d. Jumlah aparaturnya pemerintah Desa penerima Penghasilan tetap ;



- e. Unit komunikasi di Desa ;
- f. Jumlah Posyandu di Desa ; dan
- g. Keterjangkauan.

#### Pasal 5

- (1) Rumus penentuan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan asas merata dan adil.
- (2) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (3) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (  $BD_x$  ) yang dihitung dengan rumus dan variabel yang telah ditentukan, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional ( ADDP ).
- (4) Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
  - a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60 % (enam puluh persen) ;
  - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (5) Penentuan besaran Alokasi Dana Desa yang diterima Desa, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 6

- (1) ADD digunakan untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).



- (3) Ketentuan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
    1. Penghasilan tetap Kepala Desa ditetapkan minimal Rp. 2.000.000,- sampai dengan maksimal Rp. 3.000.000,- setiap bulan ;
    2. Penghasilan tetap Sekretaris Desa ditetapkan 70 % (tujuh puluh per seratus) dari Kepala Desa setiap bulan ;
    3. Penghasilan tetap Perangkat Desa ditetapkan 50 % (lima puluh per seratus) dari Kepala Desa setiap bulan.
  - b. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan kepada yang berstatus non PNS/TNI/Polri ;
  - c. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapat tugas sebagai Penjabat Kepala Desa, hanya diberikan Penghasilan tetap pada jabatan definitifnya.
- (4) Ketentuan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pelaksanaan pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENYALURAN

### Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I sebesar 50 % (lima puluh perseratus); dan
  - b. Tahap II sebesar 50 % (lima puluh perseratus).

## BAB VI PENGELOLAAN

### Pasal 8

Pengelolaan keuangan yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahakan, pelaporan dan pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PEMBINAAN / FASILITASI DAN PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan melaksanakan fungsi pembinaan/fasilitasi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ;

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), meliputi :
- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
  - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan oleh aparat pengawasan internal Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 12 Januari 2018, Nomor 412.6 / 81 / 418.24 / 2018, perihal Rencana Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 dan Berita Acara Nomor 412.6 / 492 / 418.24 / 2018 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 tanggal 22 Pebruari 2018,, dengan hasil peserta rapat memutuskan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal, 28 - 2 - 2018

BUPATI KEDIRI,  
TTD  
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan : di Kediri  
pada tanggal : 28 - 2 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,  
TTD  
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
 NOMOR : 13 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 28 - 2 - 2018

#### A. PENENTUAN BESARAN ADD YANG DITERIMA DESA

1. Penentuan besaran Alokasi Dana Desa yang diterima Desa, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ADD_x = ADDM + ADDP_x$$

Keterangan :

$ADD_x$  = Alokasi Dana Desa untuk Desa  $x$

$ADDM$  = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa ( Perolehan rata-rata )

$ADDP_x$  = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa  $x$  ( berdasarkan Indikator Variabel )

$$ADDP_x = BD_x \times (ADD - \sum ADDM)$$

Keterangan :

$BD_x$  = Nilai Bobot Desa untuk Desa  $x$

$ADD$  = Total Alokasi Dana Desa

$\sum ADDM$  = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

2. Penentuan Nilai Bobot Desa ( $BD_x$ ) ditentukan berdasarkan variabel.
3. Variabel merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap Desa ( $BD_x$ ) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa yang lainnya.
4. Besarnya Nilai Bobot untuk Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$BD_x = a_1 KV1_x + a_2 KV2_x + a_3 KV3_x + \dots + a_n KVn_x$$

Keterangan :

$BD_x$  = Nilai Bobot Desa untuk Desa  $x$

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$  = Angka bobot masing-masing variabel

$KV1_x, KV2_x, KVn_x$  = Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya.



5. Angka bobot masing-masing Variabel ditentukan :

Varibel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1. Jumlah penduduk Desa	V1	a1	0,30
2. Angka kemiskinan Desa	V2	a2	0,10
3. Luas wilayah Desa	V3	a3	0,10
4. Jumlah aparatur pemerintah Desa penerima Penghasilan tetap	V4	a4	0,20
5. Unit komunikasi di Desa	V5	a5	0,20
6. Jumlah Posyandu di Desa	V6	a6	0,05
7. Keterjangkauan	V7	a7	0,05
Jumlah Bobot			1,00

6. Koefisien Variabel Desa, merupakan perbandingan antara angka variabel setiap Desa dengan jumlah total variabel seluruh Desa.

7. Besarnya Koefisien Variabel ( KV ) untuk Desa, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KV_{1, 2, \dots, x} = \frac{V_{1, 2, \dots, x}}{\sum V_n}$$

Keterangan :

$KV_{1, 2, \dots, x}$  = Nilai Koefisien Varibel Jumlah penduduk Desa, Angka kemiskinan Desa dan seterusnya untuk Desa.

$V_{1, 2, \dots, x}$  = Angka Varibel Jumlah penduduk Desa, Angka kemiskinan Desa dan seterusnya untuk Desa.

$\sum V_n$  = Jumlah angka Varibel Jumlah penduduk Desa, Angka kemiskinan Desa dan seterusnya untuk seluruh Desa.

8. Koefisien Variabel ( KV ) untuk masing-masing Desa, setiap Variabel ditentukan sebagai berikut :

a. Jumlah penduduk

Dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk di Desa}}{\text{Jumlah Penduduk se Kabupaten}}$$

b. Angka kemiskinan Desa

Dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah Pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Desa}}{\text{Jumlah Pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) se Kabupaten}}$$



- c. Luas Wilayah Desa

Dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Luas Wilayah di Desa}}{\text{Luas Wilayah Desa se Kabupaten}}$$

- d. Jumlah Aparatur Pemerintah Desa penerima Penghasilan Tetap

Dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah Aparatur Pemerintah Desa penerima Penghasilan Tetap}}{\text{Jumlah Aparatur Pemerintah Desa penerima Penghasilan Tetap se Kab}}$$

- e. Unit komunikasi di Desa

Dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah Dusun, RW, RT, BPD dan LPMD di Desa}}{\text{Jumlah Dusun, RW, RT, BPD dan LPMD se Kabupaten}}$$

- f. Jumlah Posyandu di Desa

Dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah Posyandu di Desa}}{\text{Jumlah Posyandu se Kabupaten}}$$

- g. Keterjangkauan

Dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah Jarak Desa ke Kecamatan dan Kabupaten dikalikan skor faktor kesulitan masing-masing Desa}}{\text{Jumlah Total Jarak Desa ke Kecamatan dan Kabupaten dikalikan skor faktor kesulitan masing-masing Desa se Kabupaten}}$$

## **B. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)**

### **I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

1. Digunakan untuk Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa digunakan untuk membiayai kegiatan, antara lain :
  - a. Tunjangan Purna Bhakti bagi aparatur pemerintah desa yang purna tugas berstatus non PNS/TNI/Polri dengan ketentuan maksimal sebesar sebagai berikut :
    - 1) Kepala Desa maksimal sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
    - 2) Perangkat Desa lainnya maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;



- b. Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Aparatur Pemerintah Desa untuk Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan setiap bulan (Besaran Iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku) ;
- c. Tunjangan / Insentif Lembaga Desa setiap bulan untuk :
  - 1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
  - 2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) ; dan
  - 3) Ketua RT dan RW.
- d. Penyediaan Operasional Sekretariat Desa ;
- e. Penyediaan Jasa Komunikasi, Internet, Sumber Daya Air dan Listrik ;
- f. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional ;
- g. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Desa : Belanja Barang / Jasa honorarium setiap bulan untuk :
  - 1) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) ;
  - 2) Sekretaris Desa (Koordinator) PTPKD dan Bendahara Desa ;
  - 3) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Seksi/Kaur) ;
- h. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan ;
- j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ;
- k. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran ;
- l. Penyediaan Jasa Operasional ;
- m. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ;
- n. Pengadaan Mebeleur ;
- o. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ;
- p. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor ;
- q. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor ;
- r. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair ;
- s. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman/Pagar Kantor ;
- t. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
- u. Pemeliharaan Rutin Inventarisasi Arsip Statis ;
- v. Penyusunan RPJMDesa (Musdes, Lokakarya, PKD/ Musdus, dll) ;
- w. Penyusunan RKP Desa (Musdes, Penyusunan Desain RAB, Musyawarah Tim, Musyawarah Kades dengan BPD, Penetapan dan Penerbitan Perdes, dll) ;
- x. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ;
- y. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) ;
- z. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa ;
- aa. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ;
- bb. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran ;
- cc. Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan ;
- dd. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa ;
- ee. Penyelenggaraan Musyawarah Desa ;
- ff. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
- gg. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, LPMD, RT/RW, dll) ;

- hh. Kerja Sama Desa ;
- ii. Kerjasama Antar Desa dalam Bidang Usaha Bersama ;
- jj. Kerjasama Antar Desa dalam Bidang Pelayanan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- kk. Kerjasama Antar Desa dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban ;
- ll. Operasional BPD ;
- mm. Operasional RT/RW ;
- nn. Bela Negara.

## **II. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA :**

Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa digunakan untuk kegiatan, antara lain :

1. Operasional LPMD ;
2. Operasional PKK ;
3. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ;
4. Pembinaan Anak dan Remaja Serta Karang Taruna ;
5. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan ;
6. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama ;
7. Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan ;
8. Pelestarian Adat-Istiadat Masyarakat.

## **III. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA :**

Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa digunakan untuk kegiatan, antara lain :

1. Pengendalian Keamanan Lingkungan ;
2. Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) ;
3. Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBK) ;
4. Bersih Desa ; dan
5. Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) : Belanja Barang / Jasa untuk Honorarium KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) 2 orang @ orang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

## **IV. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA :**

Jumlah keseluruhan ADD setelah digunakan untuk Penghasilan tetap Kepala Desa/Perangkat Desa, Bidang Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan, antara lain :

1. Gedung Kantor Desa dan lembaga Desa ;
2. Sarana dan Prasarana Jalan ;
3. Sarana dan Prasarana Jembatan ;
4. Saluran Drainase/Gorong-Gorong ;
5. Tulap/Talud/Bronjong ;



6. Sarana dan Prasarana Pemakaman ;
7. Gapura (Perbatasan Desa dan Gapura Balai Desa) ;
8. Taman / Pagar Kantor Desa ;
9. Sarana dan Prasarana tempat ibadah.

BUPATI KEDIRI,  
TTD

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006